

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Al Barry, M. Dahlan dan Paul A Partanto. *Kamus Ilmiah Popular*. Surabaya: Arloka. 2011.
- Arifin. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Betran, L. Alwin. 1980. *Sosiologi*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Budiarjo, Miriam.1993. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Cangara, Hafied. 2010. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Dye, Thomas R. 1981. *Understanding Public Policy*. New Jersey: Prentice Hall.w
- Easton, David. 1969. *The Political System: An Inquiry into the State of Political Science*. New York: Knof.
- Friedrich, Carl J. 1963. *Man and His Government*. New York: McGraw-Hill.
- Herbert, Dkk. 1959. *Political socialization:A study in the Psychology of political Behaviour*, Glencoe, Illinois.
- Lubis, Solly. 2007. *Kebijakan Publik,Bandung: CV.Mandar Maju*.
- Pudjawidjana. (1983). *Model – Model Pembelajaran*. Yogyakarta : Pustaka
- Rush, Michael dan Philip Althoff. 2002. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.
- Soemohadiwidjojo, A. T. (2014). *Mudah menyusun SOP*. Penebar PLUS+.
- Subarsono, A. G. 2005. *Analisis kebijakan publik: konsep, teori dan aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitaif Kualitatif dan R & B*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2008. *Kebijakan sosial sebagai Kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.

- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta:PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia..
- Susanto.1992. *Pengantar sosialisasi*. Jakarta:Rajawali Press.
- Sutaryo. 2005. *Dasar-dasar sosialisasi*. Jakarta:Rajawali Press.
- Syarbaini, Syahrial. 2004. *Sosiologi dan Politik*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Wahab, Solichin Abdul. 1991. *Pengantar Studi Analisis Kebijakan Negara*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Wahab, Solichin Abdul. 2004. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Young, Eoin and Lisa Quinn. 2002. *Writing Effective Public Policy Papers: A Guide for Policy Advisers in Central and Eastern Europe*. Hungary: Open Society Institute.

Jurnal:

- Kurniasih, D., Fidowaty, T., & Sukaesih, P. 2013. Pengaruh Implementasi Kebijakan *E-government* Terhadap Kinerja Aparatur Kota Cimahi. *Sosiohumaniora*, 15(1), 6-14.
- Kurniati, P. S. 2016. Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Di Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Volume VI* No.
- Prayogo, I. T. Strategi Dinas Perhubungan Kota Surakarta Dalam Optimalisasi Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Berbasis *Intelligent Transport System* (Apill-Its).
- Sari, F. W., & Adibowo, R. (2017). Tinjauan Hukum Mengenai Sosialisasi, Edukasi Dan Informasi Tentang Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kota Bandung. *Maleo Law Journal*, 1(2), 236-249.
- Setiawan, A. Implementasi Program *Area Traffic Control System* Di Kota Bandar Lampung.
- Silvana, H. (2013). Peran Media Massa pada Komunikasi Politik di Indonesia. Bandung: *Jurnal JIPSI*, 1(2), 15-40.
- Sujarwo, A. P. P. (2017). Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan perhubungan dan retribusi di bidang perhubungan: studi kasus penanganan penertiban parkir liar di Kota Bandung oleh Bidang Pengendalian dan Ketertiban Transportasi Dinas Perhubungan Kota Bandung.

Rujukan Dokumen:

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan pasal 43.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan Dan Retribusi Di Bidang Perhubungan.

Keputusan Wali Kota Bandung No.551/Kep.1281-Dishub/2018 tanggal 9 Oktober 2018 tentang Pembentukan Tim Penegakan Hukum di Bidang Pengendalian dan Ketertiban Transportasi.

Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No: 273/Hk. 105/Drdj/96 tentang Pedoman Teknis Pengaturan Lalu Lintas di Persimpangan Berdiri Sendiri dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas.

Surat Edaran No.552/SE.098-Dishub tentang Penindakan Terhadap Pelanggaran Parkir Di Kota Bandung.

Rujukan Elektronik:

Pelanggaran Parkir Liar. Melalui <http://data.bandung.go.id/dataset/penindakan-pelanggaran-parkir-di-kota-bandung/resource/e25108cb-6fc6-4beb-bf02-20b7b7fa39b5>[1/3/19].

Lokasi Parkir Kota Bandung. Melalui http://data.bandung.go.id/dataset/lokasi-parkir-di-kota-bandung/resource/dbddd32a-1157-4399-af7f-6bc785b3e0f2?inner_span=True[20/3/19].

Struktur Dinas Perhubungan. Melalui <http://data.bandung.go.id/dataset/daftar-pejabat-struktural-dinas-perhubungan/resource/77eb108a-97c4-43d0-b3fb-bb77617df448>[25/7/17].

Area Traffic Control System (ATCS). Melalui <http://atcs-dishub.bandung.go.id/>[20/4/19].